

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA SUKA MAKMUR
KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWAT**

Oleh
YULIANTO B. MUSA
NIM : S2116124

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA SUKA MAKMUR
KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**YULIANTO B. MUSA
NIM : S2116124**

**Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal,.....2020**

PEMBIMBING I



H. Umar Sune, S.Sos., M.Si

PEMBIMBING II



Drs. Noor Asief, M.Si

LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO

Oleh

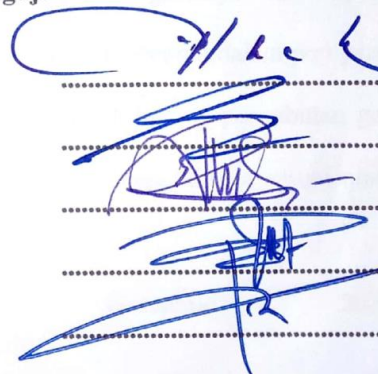
YULIANTO B. MUSA

NIM : S2116124

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal..... 2020

Komisi Penguji

- 1 **H. Umar Sune, S.Sos., M.Si**
- 2 **Drs. Noor Asief, M.Si**
- 3 **Dr.Hj.Gretty Sy. Saleh, S.IP., M.SI**
- 4 **Iskandar Ibrahim, S.IP., M.SI**
- 5 **Edy Sijaya, S.IP., M.SI**



Mengetahui :

Dekan FISIP,



Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN :0913.0786.02

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan,



Darmawati Abdulrazak, S.IP., M.AP
NIDN :0924.0767.01

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan



YULIANTO B. MUSA
NIM : S2116124

ABSTRAK

YULIANTO B. MUSA NIM : S2116124, 2020, Pemberdayaan Masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya Peran Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam hal pemberdayaan masyarakat sebagaimana observasi awal penulis, Hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat yang masih tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif rendah.

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu dalam memperkaya konsep pemberdayaan masyarakat dan secara praktis adalah untuk menjabarkan secara praktis yang dilaksanakan pemerintah desa Suka Makmur dalam hal pemberdayaan masyarakat, Objek penelitian adalah Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kab. Pohuwato dan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Peran Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Suka Makmur kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Defenisi Operasional Variabel, Chamber menjelaskan bahwa indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya self-reliant (kemandirian), self-confident (rasa percaya diri), self-respecting (pengakuan diri). Sehingga Supriatna menyatakan bahwa indikator yang dijelaskan oleh Chamber termasuk ke dalam nilai, dimana nilai ini yang menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat dalam memandang lingkungan serta dapat memberikan kekuatan dan rasa aman bagi masyarakat tersebut. Nilai inilah nanti yang akan menjadi pemandu dalam membandingkan, menilai, dan memutuskan suatu tindakan masyarakat (Basith). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa Suka Makmur, Sekretaris Desa Suka Makmur, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Masyarakat Sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur telah menunjukkan keberhasilan yang walaupun belum secara signifikan, namun kegiatannya telah dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran program pemberdayaan yang berdomisili di desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato. Keberhasilan program Pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur karena peran kepala desa dalam menumbuhkan rasa percaya diri yang ditumbuhkan kepada masyarakat melalui komunikasi dan kerjasama yang sehingga masyarakat sangat menyadari dalam pemanfaatan potensi atau sumberdaya pendukung tumbuh menjadi sebuah dorongan dalam melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Perjuangan merupakan bukti bahwa engka belum menyerah, peperangan selalu menyetai lahirnya suatu mu'jizat. Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab.

(yanto)

Penumbuh semangat hidup

Sesungguh bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan berharaplah

(Q.S Al Insyirah-6-8)

PERSEMBAHAN :

Karya ini kupersembahkan sebagai tanda bhaktiku kepada :

1. Ucapan Syukur Dan Terimakasih Untuk Allah Swt Yang Telah Memberikan Petunjuk Dan Kelancaran Atas Terselesaikannya Skripsi Ini
2. Terima Kasih Untuk Ayah Dan Ibu Saya Atas Segala Dukungan, Doa, Arahan Dan Nasehatnya
3. Terima Kasih Juga Untuk Istri Dan Anak-Anak Saya Yang Selalu Memberikan Motivasi, Dan Inspirasi Dalam Hidup Saya
4. Dan Terima Kasih Juga Untuk Semua Keluarga Saya Yang Mengharapkan Keberhasilan Dan Kebahagiaan Masa Depan Saya, Semangat Dan Doa Yang Menyertai Saya Sehingga Saya Mencapai Cita-Cita Ini
5. Terima Kasih Kepada Dosen-Dosen Saya Atas Bimbinganya

**Almamaterku tercinta
Tempat aku menimba ilmu
Universitas ichsan Gorontalo**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, karena atas berkat Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ,alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk melakukan penelitian pada Jurusan/ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak.,M.Ak selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Arman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Marten Nusi, S.IP,. M.AP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo
5. Bapak H. Umar Sune, S.Sos,. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Nurasief, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, demi selesainya Skripsi ini

6. Ibu dan Bapak Staf Dosen serta staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu segala kebutuhan penulis selama kuliah di Kampus tercinta ini Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Teman-teman seangkatan yang saling memberikan semangat untuk tetap berjuang demi selesainya studi ini.

Akhirnya dengan menyadari keterbatasan yang dimiliki penulis Skripsi ini, maka penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	
PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
2.1 Rumusan Masalah	8
3.1 Tujuan Penelitian	8
4.1 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Pemberdayaan	10
2.2 Pengertian Masyarakat.....	17
2.3 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.6 Strategi Pemberdayaan	25

	10
2.7 Teori Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat.....	28
2.8 Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Objek dan Lokasi Penelitian	31
3.2 Desain Penelitian	31
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Desa Suka Makmur	36
4.1.2 Periode Kepemimpinan Kepala desa Suka makmur.....	39
4.1.3 Visi Misi Desa Suka Makmur.....	39
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa.....	40
4.1.5 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Hasil Penelitian.....	45
4.3 Pembahasan.....	59
BAB. V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kenaikan taraf hidup masyarakat, tetapi terutama sejauhmana pembangunan itu dapat menumbuhkan motivasi dan kemampuan dari suatu masyarakat yang berubah untuk mandiri. Kemauan masyarakat itu sendiri sebagai kunci untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat. Karena pembangunan pada dasarnya suatu aktivitas yang dapat merubah kondisi sosial yang diinginkan dan diperankan bukan saja oleh unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembangunan dalam hal ini pemerintah semata, tetapi perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, berarti dapat meningkatkan kemandirian yaitu, suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada mereka, termasuk kelembagaannya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan

masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Sehingga tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan, meningkatkan pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang sangat menentukan sebagai berhasilnya dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Proses pembangunan saat ini dititik beratkan pada bagaimana memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berasal dari akar rumput (*grasroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi sesama manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna secara dinamis sehingga dapat mencapai tujuan yang bersama. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang baik dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis adalah individu maupun masyarakat yang menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan dimasa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses

pembangunan lebih mengedepankan paradikma politik sentralistik dan dominanya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisakan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Sehingga dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah selalu bermuara ke desa.

Keberhasilan pembangunan ditingkat desa bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan dan partisipasi masyarakat itu sendiri sebagai wujud pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan lebih terarah. Apabila adanya bimbingan dari kepala desa, tingkat pendidikan masyarakat, mendukung, kesejahteraan masyarakat terpenuhi serta sosial budaya mendukung. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa maka kegiatan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya.

Seorang kepala desa, selaku pimpinan tertinggi didesanya, tentu sangat diharapkan peranya dalam membina memberdayakan masyarakatnya. Peran kepala desa penting dalam memberikan peranan kepada masyarakat, memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan dari desa, oleh desa untuk desa.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era golablisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi dilakukan pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artike-artikel dalam media massa. Kesimpulanya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidak berdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalah-masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah teradap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor mempengaruhi maka permasalahanya tidak dapat dipecahkan.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari perluasan dari kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan

pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi strategi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan penyerapan tenaga. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakan (Ginandjar Kartasasmita).

Pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui program pembangun desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong atau swadaya murni, yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui masyarakat desa. Dalam pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan bukanlah semata mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada.

Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan.

Kurangnya peranan pemerintah terutama Pemerintah Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam hal pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang menjadi hasil awal pada survei yang di lakukan oleh penulis, Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat perekonomian yang tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif rendah, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan kepadanya.

Dapat di uraikan bahwa kondisi atau keberadaan masyarakat Desa Suka Makmur dari tahun ketahun sebenarnya sudah memperoleh perhatian dalam rangka peningkatan perekomian baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, Hal dapat dipaparkan bahwa masyarakat desa Suka Makmur yang terdiri dari 420 Kepala Keluarga yang tersebar di 4 Dusun yaitu : dusun karya, dusun bakia barat, dusun bakia timur, batonu. Program pengentasan kemiskinan melalui

pemberdayaan masyarakat telah menyentuh masyarakat. Pada tahun 2017 terdapat 40 KK dari jumlah 120 KK miskin yang telah tersentuh oleh program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun berbagai program tersebut antara lain bantuan hewan ternak, bantuan kelompok keterampilan menjahit, keterampilan kerawang, bantuan kios sembako, mesin pemangkas dan beras miskin. Namun menurut pengamatan penulis bahwa program ini pada umumnya belum memberikan dampak perubahan atau peningkatan perekonomian masyarakat yang miskin ada di desa Suka Makmur, apalagi sasaran bantuan ini adalah masyarakat yang terdaftar pada Data TP2K.

Permasalahan diatas terjadi dikarenakan masih kurangnya peran kepala desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai pengawas serta sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada menunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik serta membangun sikap yang mandiri.

Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat merupakan faktor yang terpenting. Sebagai pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam membina, membimbing dan memberi pegarahan kepada aparat desa dan kepada pengurus-pengurus organisasi desa yang lainnya akan membantu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta tujuan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat, meningkatkan mutu dan kualitas pengetahuan dan pendidikan

masyarakat desa, dan sekaligus dapat digunakan sebagai kinerja seorang kepala desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan usaha-usaha dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah pedagang kecil, usaha-usah kecil, petani miskin, orang miskin.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”?**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu dalam memperkaya konsep pemberdayaan masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjabarkan secara praktis yang dilaksanakan pemerintah Desa Suka Makmur khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan. Pengertian tersebut dapat diperluas pemaknaannya bahwa peranan adalah suatu penampilan atas tingkah laku tertentu dari seseorang yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. Menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Peranan ditentukan oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya, dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Koentjaraningrat (1981:172) menyatakan bahwa peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam kedudukannya di mana ia berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukannya. Oleh sebab itu peranan merupakan bagian manusia yang memainkan pada setiap keadaan secara tingkah laku yang menyelaraskan diri manusia dengan keadaan, Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya di dalam masyarakat.

Sementara itu kata peran menurut Sugondo (2001:85) memiliki makna tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang akan oleh seorang pemimpin atau bawahan yang mendapat kepercayaan dari organisasi kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Siswanti (2003:93) dimana peran diartikan sebagai tanggung jawab individu yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pengalaman kerja dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dipercayakan organisasi pada pimpinannya.

Jadi dari beberapa uraian tentang pengertian peranan di atas, maka peranan merupakan bentuk perlakuan/implementasi yang dilakukan seorang pemimpin kepada bawahannya dalam sebuah organisasi berdasarkan kedudukannya untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dijelaskan pula bahwa peranan ini menggambarkan bagian dari seorang pemimpin yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari terhadap individu yang membutuhkannya baik sebagai pemberi solusi atas masalah dalam masyarakatnya yakni yang paling khusus masalah kesejahteraan mereka.

2.2.Peran Kepala Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran Kepala Desa Menurut Ndraha (1991:152), Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersagkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

1. Memimpin pemerintahan desa
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa
3. Membina kehidupan masyarakat disegala bidang

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan ada dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (empowerment) menurut Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan. sedangkan menurut Wuradji yang dikutip oleh Aziz pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan

secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat., sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan melalui serangkain kegiatan untuk memperkuat keberdayaan suatu kelompok lemah di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukan pada serangkaian tindakanatau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sitematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik

knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjukpada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan /tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh,

2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” dari pada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998: 75-76). Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian (TriWinarni, 1998: 75).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara

eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winarni, 1998: 76).

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah : 1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 1998: 76). Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat.

Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota

masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Tahap-Tahap Pemberdayaan Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisikan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83)

2.4 Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009: 115-118) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- 1) Interaksi antar warga-warganya,
- 2). Adat istiadat,
- 3) Kontinuitas waktu,
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

2.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai masyarakat sering sekali kita mendengar mengenai adanya program pembangunan wilayah dilingkungan tempat tinggal kita yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah (swasta), akan tetapi masih banyak sekali diantara masyarakat

kita, baik yang menikmati secara langsung maupun tidak secara langsung hasil dari keberhasilan suatu proses pemberdayaan dilingkungan tersebut.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaan perlu ditunjang oleh kompetensi yang mampu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013 : 10).

Menurut Rappaport (1984) dalam Oos M. Anwas (2013 : 49), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Parsons (1994) dalam Oos M. Anwas (2013 :49). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Prasodjo (2004:12) mengemukakan beberapa hal mengenai pemberdayaan masyarakat, antara lain :

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses.
4. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada manusia.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek : pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Oos M. Anwas, 2013 : 48). Djohani (2003) dalam Oos M. Anwas (2013 : 49), mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan

daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Oos M. Anwas, 2013 : 49).

Edi Suharto (2009 :57) mendefinisikan secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Berdasarkan pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada sekelompok orang yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama dengan cara memberi dorongan, peluang,

kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

2.6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Hikmat (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan sarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis.

Hogan (2000), dalam Rukminto (2008) mengidentifikasi proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai

persoalan terkait kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya, pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak baik pemerintah, pihak non-pemerintah, maupun masyarakat yang terlibat itu sendiri untuk dapat menjamin tercapainya hasil yang akan dituju.

2.7 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

2.8 Kerangka Pikir

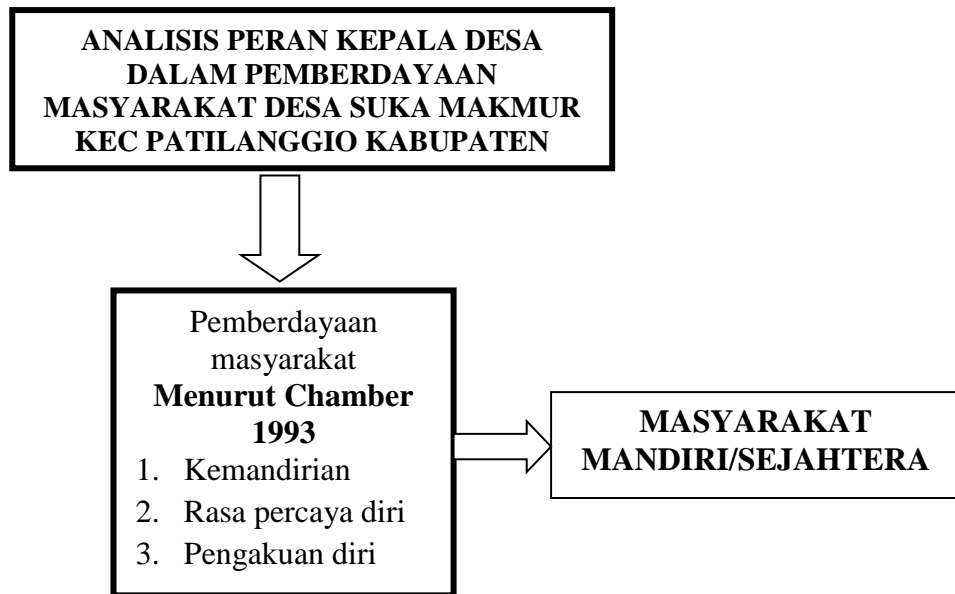
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 yakni kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai penguasa tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara peran pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat.

Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat, Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

3.2 Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Menurut Bogdan dan Taylor (1993: 30), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan secara menyeluruh (holistik).

3.3. Defenisi Operasional Variabel

Chamber menjelaskan bahwa indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya self-reliant (kemandirian), self-confident (rasa percaya diri), self-respecting (pengakuan diri). Sehingga Supriatna menyatakan bahwa indikator yang dijelaskan oleh Chamber termasuk ke dalam nilai, dimana nilai ini yang menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat dalam memandang

lingkungan serta dapat memberikan kekuatan dan rasa aman bagi masyarakat tersebut. Nilai inilah nanti yang akan menjadi pemandu dalam membandingkan, menilai, dan memutuskan suatu tindakan masyarakat (Basith).

3.4 Informan Penelitian

Pada teknik pengambilan *informan* penulis menggunakan cara purposive sample yaitu ditetapkan sengaja oleh penulis. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa Suka Makmur, Sekretaris Desa Suka Makmur, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Masyarakat Sasaran.

3.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian maupun wawancara dengan para informan secara langsung.
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu mengambil data melalui sejumlah buku, dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan

gambaran berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Untuk menyempurnakan aktifitas pengamatan partisipan, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang diteliti.

1. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung kepada informan. Pendapat Bungin (2008:108) yang menyatakan bahwa karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada informasi yang bersumber dari dokumen; buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, prasasti dan yang sejenisnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (*key informan*). Analisis data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada. Milles dan Huberman dalam Silalahi (2009:339) menyatakan bahwa “kegiatan analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.3 Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

3.4 Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Menurut Bogdan dan Taylor (1993: 30), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan secara menyeluruh (holistik).

3.3. Defenisi Operasional Variabel

Chamber menjelaskan bahwa indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya self-reliant (kemandirian), self-confident (rasa percaya diri), self-respecting (pengakuan diri). Sehingga Supriatna menyatakan bahwa indikator yang dijelaskan oleh Chamber termasuk ke dalam nilai, dimana nilai ini yang menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat dalam memandang

lingkungan serta dapat memberikan kekuatan dan rasa aman bagi masyarakat tersebut. Nilai inilah nanti yang akan menjadi pemandu dalam membandingkan, menilai, dan memutuskan suatu tindakan masyarakat (Basith).

3.5 Informan Penelitian

Pada teknik pengambilan *informan* penulis menggunakan cara purposive sample yaitu ditetapkan sengaja oleh penulis. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa Suka Makmur, Sekretaris Desa Suka Makmur, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Masyarakat Sasaran.

3.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian maupun wawancara dengan para informan secara langsung.
4. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu mengambil data melalui sejumlah buku, dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan

gambaran berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Untuk menyempurnakan aktifitas pengamatan partisipan, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung kepada informan. Pendapat Bungin (2008:108) yang menyatakan bahwa karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada informasi yang bersumber dari dokumen; buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, prasasti dan yang sejenisnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (*key informan*). Analisis data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada. Milles dan Huberman dalam Silalahi (2009:339) menyatakan bahwa “kegiatan analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Desa Suka Makamur

Tertulis / terdengar wilayah pemukiman warga yang begitu luas membentang orang menyebutnya Dusun **BAKIA**, wilayah ini merupakan dataran yang rendah yang ditumbuhi pepohonan dan Padang rumput yang luas menghijau bak hamparan permadani yang di beberapa bagian terdapat rawa-rawa yang menghiasi setiap pemandangan dibagian selatan sedangkan dibagian utara,timur,barat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan prinitif, Dusun “Bakia” yang terletak 17 Km kearah Barat dari Kecamatan Marisa.

Dusun ini merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Desa Iloheluma dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah selatan dari Desa itu. Hingga suatu ketika penduduk makin bertambah dengan adanya arus perpindahan penduduk, banyak yang berdatangan dari berbagai wilayah dan tinggal menetap di Dusun ini terutama dari Desa Imbodu yang merupakan Induk pemekaran Desa Iloheluma, oleh para pemuka masyarakat potensi ini tidaklah disia-siakan, pada setiap kesempatan mereka membahas masa depan dusun mereka, maka bergulirlah sebuah ide bahwa Dusun BAKIA harus berpisah dari Desa Induk dan menjadi sebuah Desa yang mandiri, ide pemekaran ini terinformasi kemana-mana dan pusaran makin besar yang menyedot segala aktivitas, perhatian dan pemikiran-

pemikiran guna mewujudkan suatu harapan baru dalam tatanan kehidupan yang baru dan hanya dalam hitungan bulan segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang dan tibalah saat-saat yang sudah lama dinanti-nantikan.....saatnya pemekaran....!!!!, ketika itu masih ada satu hal yang teramat penting untuk berkelanjutan cita-cita ini yang seolah terlupakan oleh semua pelaku pemekaran yakni nama dari desa dambaan ini. Selanjutnya dibuatlah rapat untuk menentukan nama Desa, Dalam fórum tersebut terjadi suatu musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa Iloheluma dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Persiapan Pemekaran dengan hasil musyawarah bahwa Desa itu diberikan nama Desa " **SUKA MAKMUR** " yang dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemekaran Desa ini melalui proses yang panjang dengan memperhatikan kiat-kiat tokoh masyarakat yang ada dan selalu memakmurkan Dusun itu terutama dalam mendukung Program Pemerintah baik itu Program Pembangunan maupun Program lainnya.
- b. Pengambilan Nama Desa Pun masih dimusyawarahkan dan sangat memperhatikan kondisi masyarakat yang sangat antusias terhadap pembangunan Desa dan secara geografis Desa Sukamakmur terbentuk pada tahun 1995, atas prakasa dan perjuangan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda desa saat itu. Luas desa sekitar 20.000 Km² dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2014 adalah 1.406 jiwa atau 444 KK dengan jumlah dusun adalah 4 dusun. Sebagian besar penduduk tersebut memeluk

agama islam dengan jumlah suku sekitar 3 suku, yakni suku Gorontalo, Jawa, dan Sanger.

- c. Desa Sukamakmur masuk dalam wilayah Kecamatan Patilanggio dimana sebelah utara berbatasan dengan desa Iloheluma, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Dulomo, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Randangan/ desa Omayuwa dan sebelah timur berbatasan dengan desa Dudepo. Topografi desa sebagian besar dataran dimana sekitar 30 persen wilayah pesisir.
- d. Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani kebun dimana untuk petani didominasi oleh petani jagungkelapa dan coklat. Luas lahan tanaman jagung saat ini kurang lebih 174 Ha dengan jumlah kelompok tani sekitar 12 kelompok. Sedangkan mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah pedagang (kios). Adanya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan masyarakat, sampai saat ini keharmonisan antara warga dan system pemerintahan berjalan dengan baik.
- e. Desa Sukamakmur pada akhir tahun 2012 telah mengadakan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dimana yang terpilih adalah Kepala Desa sekarang yakni Ardjun B.Polimengo untuk periode 2012-2018.
- f. Pada akhir tahun 2018 telah berakhir masa jabatan Kepala Desa yang terpilih maka di perintahkan salah satu pegawai kecamatan menjadi penjabat kepala desa di desa sukamakmur hingga Pertengahan tahun 2018.
- g. Dengan berakhirnya masa jabatan penjabat kepala desa sukamakmur, maka di adakan kembali Pemilihan kepala desa secara langsung dimana yang terpilih adalah kepala desa yang baru yakni Bapak Badrun yonu, S.Pd.

4.1.2 Periode Kepemimpinan Kepala desa Suka makmur

Tabel : 4.1 Periode Kepemimpinan Kepala Desa Suka Makmur

NO	NAMA	JABATAN	PERODE	KET
1	Dedo S. Moha	Kepala Desa	1994-1999	Definitip
2	Hasan Tinggi	Kepala Desa	1999 - 2005	Definitip
3	Darwin Tolingguhu, S.Sos	Kepala Desa	2005 - 2006	PLH
4	Tahirun Nasaru, S.Sos	Kepala Desa	2006 - 2006	PLH
5	Ardjun B. Polimengo	Kepala Desa	2006 - 2011	Definitip
6	Abdul Haris Olii, SH	Kepala Desa	2011 - 2012	PLH
7	Ardjun B. Polimengo	Kepala Desa	2012 - 2016	Definitip
8	Kamaru Padjuli, SE	Kepala Desa	2016 - 2018	Penjabat
9	Badrun Yonu, S.Pd	Kepala Desa	2018 - sekarang	Definitip

Sumber Data : Kantor Desa Suka Makmur 2019

4.1.3 Visi Misi Desa Suka Makmur

Visi :

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa Suka Makmur, visi tersebut adalah arah pembangunan desa yang dicita-citakan sebagai tujuan masa depan desa. Visi desa Suka Makmur untuk masa jabatan pemerintahan tahun 2018 – 2024 adalah “Menuju Desa Suka Makmur Berdaulat, Dinamis, Kreatif, Inovatif, Mandiri, Santun dan Berkepribadian”.

Misi :

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi desa Suka Makmur tahun 2018 – 2024, “Terwujudnya Masyarakat Desa Suka Makmur maka ditetapkan misi pembangunan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Desa Suka Makmur
2. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi potensi lokal.
3. Terwujudnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan social.
5. Melestarikan seni budaya dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
6. Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.

4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa

1. Kepala Desa

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi perangkat desa. Melaksanakan urusan perencanaan meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan dan evaluasi program. Menyusun laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Kaur Keuangan

Menyiapkan laporan penyusunan RAPBDesa, mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan desa, menerima hasil pendapatan asset desa, menatausahakan desa. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi lembaga pemerintah.

4. Kaur Tata Usaha & Umum

Mencatat dan menginventarisir asset desa, memelihara asset desa, mengelola administrasi kepegawaian, melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, melakukan penataan arsip desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

5. Kaur Perencanaan

Menyiapkan bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, menyiapkan bahan penyusunan LPPD, IPPD, dan LKPJ kepala desa, menyiapkan bahan

perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring serta penyusunan laporan.

6. Kasie Pelayanan

Menyiapkan berkas-berkas dalam pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, mencatat hasil pelayanan administrasi, melaporkan hasil pelayanan administrasi, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.

7. Kasie Kesejahteraan

Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan desa. pencatatan hasil-hasil pembangunan desa, penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan identifikasi usaha mikro, pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan, melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

8. Kasie Pemerintahan

Pelaksanaan administrasi kependudukan, pertanahan, kerja sama desa, pelaksanaan pemilu, pilkada dan pilkades, pelaksanaan kegiatan social politik dan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban,

melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun pasangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

9. Operator Siskeudes

Melakukan beck-up data setiap minggu, melakukan export-import data setiap kali penagihan dan setelah selesai pencairan dana, bertanggung jawab atas proses aplikasi dalam tahun berkeaan dari awal penyusunan APBDes sampai penyusunan laporan pertanggung jawaban APBDes.

10. Operator Profil Desa

Melakukan penginputan data profil desa, melakukan beck-up data profil desa dalam setiap bulan, bertanggung jawab penuh atas proses aplikasi profil desa, bertanggung jawab penuh dalam hal pemeliharaan computer menyangkut peralatan softwere, hardwere, anti virus dan jaringan.

11. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa Dalam Pelaksanaan tugas di wilayahnya. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahya dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1.5 . Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Suka Makmur

Terlampir

4.2 Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dapat duraikan sebagai berikut :

Peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan pada prinsipnya akan menodorong masyarakat untuk berdaya, harus memberikan dampak yang positif terhadap kemandirian masyarakat sehingga pemerintah benar-benar menjadi agen pembangunan dalam menggerakkan masyarakatnya. Hal ini dapat dideskripsikan melalui wawancara penulis dengan aparat desa suka makmur yakni SU, di nyatakan bahwa:

“ Peran Kepala Desa Suka Makmur dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur yaitu saluran air, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berupa ketrampilan mohalamo, dll.”

Dikonfirmansi kepada informan yang lain yaitu salah seorang ibu rumah tangga sebagai masyarakat desa suka makmur , ML dinyatakan bahwa :

“Peran Kepala Desa telah ada dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri melalui bantuan usaha kecil masyarakat dengan maksud agar lebih minengkatakan kesejahteraan masyarakat di desa ini, sehingga pemerintah desa tidak terlalu disibukkan oleh berbagai macam tuntutan masyarakat.”

Dengan demikian dapat di gambarkan oleh penulis bahwa peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan secara mandiri sudah di rasakan oleh masyarakatnya, sehingga hal ini menumbuhkan rasa kebanggaan dari kepala desa atas kemandirian tersebut. Namun hal ini oleh penulis masih mengkonfirmasi dengan aparat desa linnya sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu RD, yang menyatakan bahwa :

“Meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan pemerintah mengembangkan ekonomi desa sehingga menjadikan masyarakat akan menjadi mandiri.”

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, SM terkait dengan peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat, maka diperoleh hasil wawancara adalah :

“menurut saya peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur sangatlah nyata dilakukan dengan maksud untuk menciptakan masyarakatnya yang mandiri dan sejahtera, karena memang hal ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin membutuhkan perhatian dari pemerintah itu sendiri.”

Program pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur dapat penulis jelaskan bahwasanya merupakan suatu pengejawantahan atas peran kepala desa dalam menyadarkan masyarakatnya agar ikut serta bertanggung jawab dalam mensukseskan program pemerintah terutama pemerintah desa suka makmur, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di desa suka makmur dapat terwujud yaitu membangun kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat desa suka makmur.

Berdasarkan penuturan informan di atas, bahwa Peran kepala desa telah menapakkan sebuah perubahan misalnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan jalan, drainase dan perbaikan rumah layak huni, pembuatan jalan usaha tani, penyediaan bibit.

Demikian juga di peroleh informasi dari hasil wawancara dengan salah satu staf di kantor desa suka makmur, yaitu HP tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, di katakan bahwa :

“Peran kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sangat baik dalam menjalankan tugas dan peran kepada masyarakat. Peran yang nampak

dimasyarakat terutama adalah pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan potensi yang mereka miliki”

Kemudian dikonfirmasi kepada Kaur perencanaan, yakni SA dikatakan bahwa : Peran Kepala Desa sangat penting dalam pemberdayaan dengan dibuktikan untuk memberikan pelayanan yang sangat penting, beliau selalu memperjuangkan bantuan masyarakat dalam pemberdayaan. Selain penuturan dari kaur perencanaan di atas, maka dengan penulis melakukan wawancara dengan kaur keuangan desa Suka Makmur yaitu MN, dimana dinyatakan bahwa :

“Peran Kepala desa terhadap masyarakat sangat baik, kepala desa dengan bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan dan sangat baik, adil apalagi terhadap program pemberdayaan masyarakat desa Suka Makmur.”

Pernyataan lainnya sebagaimana disampaikan oleh kasi pemerintahan yaitu AA, dikatakan bahwa :

“Bapak Kepala Desa Suka Makmur sangat berperan penting dalam kegiatan yang ada di desa Suka Makmur dan beliau juga selalu memberikan dukungan terhadap pelaku kegiatan yang ada di desa dan beliau berharap semua kegiatan akan selesai waktu yang telah ditentukan.”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian yang mempertimbangkan berdasarkan indikator kemandirian, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa peran kepala desa Suka Makmur telah menjadikan masyarakatnya mandiri melalui kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa Suka Makmur.

Selanjutnya penulis menyajikan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan indikator pemberdayaan melalui rasa percaya diri. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa suka makmur melalui peran kepala desa sebagai penggerak dan motivator sehingga masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan segala daya dan potensi yang dimilikinya, sebagaimana yang dimanahkan oleh tujuan pembangunan.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan kepala desa suka makmur harus benar-benar memberikan dukungan maupun support yang tinggi sehingga terbentuk rasa percaya diri masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Hal ini penulis peroleh dari informan- informan yang memahami permasalahan serta mengenal sasaran masalah penelitian. Sebagaimana pernyataan dari aparat desa suka makmur, SS dinyatakan bahwa :

“tentang peran kepala desa ini saya melihat ada kemandirian dan peningkatan terutama perhatian kepala desa dalam memberikan perhatian yang lebih kepada setiap warga masyarakat misalkan memberikan dorongan semangat dalam memberdayakan segala kemampuan atau potensi yang ada pada diri setiap warga masyarakat sehingga akan tercapai harapan ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mandiri. Saya juga lihat kepala desa ini selalu mendekati masyarakat dengan cara kekeluargaan, dan saya lihat masyarakat sangat senang dengan caranya kepala desa ini, karena masyarakat terdorong untuk selalu mendukung setiap program pemberdayaan di desa kami ini. Contohnya ada keluarga yang butuh bantuan modal usaha kecil, maka kepala desa selalu mengarahkan masyarakat agar lebih semangat berusaha secara mandiri agar menjadi masyarakat yang memiliki kepercayaan diri untuk lebih baik lagi. masyarakat memiliki rasa percaya diri dalam mengelola usaha sehingga dengan begitu mereka terdorong lebih giat untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.”

Pernyataan informan di atas, dikuatkan lagi dengan adanya pernyataan salah seorang warga desa suka makmur, ML, dimana di katakan bahwa :

“Kepala desa kami sangat baik komunikasinya dengan warga masyarakat di desa ini, itu saya lihat dari cara mendekati masyarakat dengan cara kekeluargaan, diia tidak terlalu menonjolkan diri sebagai pemimpin di desa

kami ini, tetap dia selalu membangun kerja sama yang baik dengan seluruh warga masyarakat kami, misalnya kalau ada warga yang belum tersentuh bantuan program pemberdayaan dia berusaha memberikan penjelasan dengan cara yang baik, masyarakat diberikan dorongan, kalian pasti satu saat akan menjadi warga yang sejahter apabila usaha kamu ini kamu kelola dengan baik. Saya minta sekalipun bantuan ini sedikit-sedikit In syaa Allah akan berkembang menjadi bagus.”

Kepala desa suka makmur dinilai oleh warganya termasuk yang sangat memperhatikan warganya dalam program pemberdayaan masyarakat, karena mampu meyakinkan kepada warganya mereka pasti bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik dari sekarang jika warganya bersungguh-sungguh terhadap apa yang di lakukan sekarang. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang perangkat desa , kasi pelayanan, desa suka makmur, SS sebagai berikut ini :

“Kades kami di sini sangat memahami keadaan warganya, karena dia selalu membangun kepercayaan diri masyarakatnya melalui program pembangunan yang ada, terutama program untuk pemberdayaan masyarakat. Pak kades selalu mengatakan kepada masyarakat agar tetap giat bekerja melalui bantuan program dari pemerintah, dan yajinlah pasti kamu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dengan kemampuan yang ada pada diri kalian semua tidak boleh putus asah, selalu semangat pasti bisa menjadi sejahter. Pernah ada salah seorang warga yang mengeluhkan bahwa dia jarang dapat bantuan dari desa, terus kades hanya tanya sejak kapan kamu tidak terima bantuan? Saya baru satu kali terima bantuan sapi, bagaimana diberikan sapi tapi hanya kamu jual, Kalau kami pelihara baik-baik itu sapi, sekarang so banyak depe anak sapi dan kamu akan banyak miliki sapi, makanya jaga baik-baik bantuan pemerintah karena kamu yang menikmatinya bukan siapa-siapa”

Dari hasil wawancara di atas, penulis mengkonfirmasi kepada informan lain yakni ML tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa suka makmur melalui rasa percaya diri. Dinyatakan bahwa :

“Hubungan baik kepala desa dengan kami warga masyarakat desa suka makmur sangat mendukung pelaksanaan pembangunan serta program pemberdayaan di sini memberikan hasil yang baik karena kepala desa menurut saya sering mendorong masyarakat serta memberikan dukungan serta meyakinkan warga masyarakat agar lebih percaya diri dalam berusaha

memenuhi kebutuhan keluarganya dengan mempergunakan bantuan program pemberdayaan dengan sebaik-baiknya walaupun sifatnya berupa stimulus bagi masyarakat yang menjadi sasaran bantuan tersebut. Alhamdulillah masyarakat kami juga merasa berterima kasih atas perhatian pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat “

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di jelaskan bahwa peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat melalui penekanan pada rasa percaya diri tinggi kepada warga masyarakatnya sudah baik hal banyak di rasakan oleh aparat yang selama ini menjadi pendamping program pemberdayaan di desa suka makmur.

Percaya diri dan dukungan yang diberikan kepala desa kepada warga masyarakatnya sangat mendukung atas keberhasilan pembangunan di desa suka makmur terutama program pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya penulis paparkan hasil wawancara dengan warga masyarakat terkait dengan pemberdayaan melalui rasa percaya diri yang menjadi kunci keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat. Seperti dikatakan oleh informan AN, dikatakan bahwa :

“ saya rasa peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat masih biasa-biasa saja, saya kira tidak ada yang lebih dilakukan untuk masyarakat karena memang tugas seorang kepala desa dalam memberdayakan masyarakat sudah menjadi tanggungjawabnya, sehingga jika dikatakan sudah sangat baik tentu masih ada juga yang kurang dilakukannya misalnya, ada warga yang layak disentuh oleh program pemberdayaan tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya, alasannya akan diperhatikan tahun depan, namun sampai saat ini belum juga diberikan bantuan. Ini menurut saya peran kepala desa belum berhasil dalam membangun rasa percaya diri kepada masyarakat, karena masih ada juga masyarakat yang mengeluh tentang sikap kepala desa ini.”

Hasil pernyataan informan di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dari kepala desa suka makmur dalam mewujudkan masyarakat yang tidak tergantung pada program pemberdayaan secara merata. Fungsi yang dijalankan kepala desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Rasa percaya diri yang di tanamkan kepada masyarakatnt belum membuahkan hasil yang maksimal. Percaya diri tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri sehingga walaupun kepala desa telah berbagai upa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prigram pemberdyaan namun belum maksimal hasilnya.

Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengakuan diri. Seperti diketahui bahwa peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengakuan diri dapat diuraikan berdasarkan pernyataan dari beberapa informan sebagaimana akan diuraikan berikut ini a;

Hasil wawancara penulis dengan perangkat desa suka makmur AN, sebagai kepala dusun, dinyatakan sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat saya mengamati bahwa peran kepala desa sangat menentukan keberhasilan proram tersebut, dan alhamdulillah kepala desa menunjukkan kemampuan dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui sebuah pengakuan diri terhadap upaya kerja dari masyarakat yang dihasilkan dari pengembangan program pemberdayaan masyarakat itu sendir. Hal tersebut juga saya bisa jelaskan sebagaimana dinyatakan terhadap bentuk pengakuan diri yang disampaikan kepada masyarakat di desa kami tersebut.”

Adapun yang bisa penulis jelaskan terhadap tanggapan informan tersebut di atas, maka peran kepala desa suka makmur terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan di kalangan warga masyarakat sudah dianggap sesuai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum merasa maksimal atas upaya kepala desa. Hal tersebut dikuatkan adanya pernyataan informan lain sebagai aparat desa suka makmur, yakni AT menyatakan bahwa :

“ Karena tugas dan fungsi sehari-hari kepala desa suka makmur sebagai pelayan masyarakat, memiliki kekuasaan serta tanggung jawab di Pemerintah desa ini tidak bisa dilepas dari perannya sebagai pemberi dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pengakuan diri terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat yang diberikan dalam bentuk bantuan lunak kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memperbaiki keadaan kehidupannya dari yang semula tidak mampu menjadi mampu dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarganya sendiri.”

Berdasarkan uraian informan di atas, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan pengakuan terhadap hasil program pemberdayaan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan harapan menjadi mandiri.

Dapat juga jelaskan bahwa peran kepala desa telah memberikan perubahan serta dampak yang positif terhadap kemajuan desa suka makmur terutama perubahan dalam bidang pembangunan dan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga. Selanjutnya saya paparkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, AT, yang menyatakan bahwa :

“Kepala desa suka makmur merupakan figur pemimpin yang memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat terutama masyarakat yang miskin dan membutuhkan sentuhan program pemberdayaan dari pemerintah terutama pemerintah desa, kades selama ini berusaha melakukan

perubahan pola pikir dan pola sikap kepada masyarakat agar lebih memberdayakan diri melalui potensi yang dimiliki masing-masing sehingga kemandiri dapat diperoleh di masa yang akan datang, dengan tidak ketrgantungan terhadap rogram pemerintahan, kades mengakui bahwa masyarakat pasti mau untuk lebih maju lagi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarganya sendir, ini terdorong oleh adanya pengakuan yang diberikan kepala desa atas hasil yang diperoleh ari program bantuan yang selama ini dikucurkan kepada kami.”

Dari pernyataan informan tersebut, saya melakukan wawancara kepada masyarakat yang merupakan anggota masyarakat desa suka makmur, yakni SM, di katakan bahwa :

“Peran kepala desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat sangat baik dan luar biasa. Berkat kepeduliaan beliau kepada kami sebagai warga di desanya sehingga berbagai program kami sudah menikmatinya dan kadespun menilai dan mengakui jerih upaya kami dalam memanfaatkan bantuan dengan sasaran kami keluarga pra sejahtrea ini. Misalny saya diberikan bantuan modal usaha kecil dari dana pemberdayaan desa suka makmur tahun lalu.”

Selanjutnya saya tampilkan penuturan dari salah seorang informan penelitian, yakni ML sebagai masyarakat yang berdimisili di desa suka makmur , dnyatakan bahwa :

“Kepala Desa mengarahkan kepada masyarakat agar menyampaikan idea tau gagasan-gagasan dalam meningkatkan inisiatif dan kreatifitas dalam mengelola, memelihara, dan memanfaatkan sumber-sumber yang disekitarnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik, pak kades sangat percaya dan mengakui bahwa kami akan mampu mengelolah usaha pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa melalui dana desa selam ini kami menerima dengan baik, sehingga pekerjaaya serta pengakuan tersebut yang mendorong kami untu lebih tertib dalam menggunakan dana desa yang diberikan kepada kami .”

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan penelitian, maka dapat penulis menyimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dipelopori oleh kepala desa seuka makmur menunjukkan peran kepala yang sangat respek terhadap kondisis masysrakatnya yang memerlukan sentuhan dari

berbagai program yang didanai oleh dana desa tersebut, masyarakat merasa bahwa peran kepala desa suka makmur menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi dari kepala desa sehingga terlihat perubahan yang sangat signifikan baik dari aspek pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan di atas, maka penulis dapat menguraikan pembahasan tentang peran kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

Dari dimensi kemandirian adanya peran serta kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah diuraikan oleh para informan penelitian diperoleh gambaran secara umum bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat mendukung keberhasilan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik, terutama program yang bermuara pada bagaimana masyarakat desa suka makmur mengalami perubahan dari yang tadinya menjadi tanggungan secara penuh oleh pemerintah berkat adanya program pemberdayaan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat mengalami perubahan baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat, memang masyarakatlah yang aktor dan penentu tetapi di sisi lain ada ketidakmampuan yang dimiliki masyarakat desa suka makmur sehingga masih memerlukan peran aktif dari kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan pemberdayaan tersebut. Sebagaimana contohnya adalah dalam program pembangunan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan sangat di

tentukan oleh bagaimana kepala desa lebih banyak memberikan dorongan maupun motivasi kepada masyarakat menjadi lebih mandiri ketika tersentuh dengan berbagai program pembangunan yang sifatnya adalah pemberdayaan. Masyarakat diperhadapkan dengan berbagai permasalahan di desa harus diberikan kesempatan untuk menemukan solusi oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa, sehingga masyarakat ketika menemukan solusi yang walaupun bukan secara keseluruhan dari masyarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses partisipatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri bahwa tantangan utama mengatasi masalah kesejahteraan keluarga, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat sebenarnya tidaklah mutlak dilakukan namun peran serta masyarakat secara mandiri itulah yang sesungguhnya kepala desa hanyalah sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat keadaan sumber daya yang berkelanjutan, bukan berarti menafikan partisipasi pihak-pihak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah basis program sebagaimana dikatakan oleh (TitokMardikanto,2019:62). Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah : program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat,

memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan , berbagai pihak terlibat, serta berkelanjutan.

Dalam pemberdayaan masyarakat memang belum dapat dihindari adanya ikut sertanya pemerintah disemua jenjang, demikian pula dengan pemerintah di desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato. Hal itu adalah merupakan amanah negara dalam rangka tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab dari semua pihak atau elemen yang ada, sehingga saya selaku peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan yang digunakan adalah program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui pemaksaan, ancaman, bujukan atau pendidikan. Dalam rangka itu sehingga sangat diperlukan peran kepala desa dalam rangka mengenalkan pemberdayaan kepada masyarakat sasaran. Memberikan motivasi sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran bagi masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat sasaran utama dalam kegiatan pembangunan dengan harapan terjadi perubahan melalui proses pembelajaran yang mandiri. Proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses “menggurui” melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif (Mead, 1959)

Peran kepala desa suka makmur dapat di identikkan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat secara mandiri terutama bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dalam kedudukan setara yang saling membutuhkan dan saling

menghormati yang selama ini dilakukan kepala desa suka makmur sebagai pejabat yang lebih berkuasa, dan dianggap yang memiliki tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Walaupun pemberdayaan yang terbentuk secara natural dari masyarakat mbisa terwujud seecara nyata namun pemerintah dessa berusaha menyentuh dengan berbagai pprogram pemberdayaan melalui sentuhan program-program pembangunan kemasayrakan, pembangunan serta pemberdayaan. Sarana dalam berkomunikasi baik antara kepala desa dengan masyrakat yang terjalin selama ini menjadi suatu cerminan atas pemimpin yang demokratis, sehingga penyelesaian setiap permasalahan pembangunan yang dilakukan kepala desa dengan masyarakat untuk menggapai harapan pepemrintah menjadikan masyarakatnya menjadi mandiri.

Peran yang dimainkan kepala desa suka makmur pada hakekatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat yang diberdayakan menjadi lebih mandiri. Upaya kepala desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat, dalam hal ini pemerintah desa harus mengambil peranan lebih besar karena mereka yang paling mengetahui kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya.

Tim Deliver (20014) memandang bahwa “pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sedniri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.”

Selaras dengan pernyataan di atas, dapat dijabarkan pula bahwa peran kepala desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sangat bersesuaian dengan pernyataan teori di atas, seperti peran kepala desa dalam mengelompokkan potensi sumber daya yang ada di desa tersebut dalam beberapa kelompok usaha secara sistematis berdasarkan kemampuan dari anggota masyarakat yang ada. Masyarakat dibagi dalam beberapa kelompok sumber daya : kelompok usaha kecil (kios), warung nasi kuning, kelompok ternak sapi, ternak kambing, keterampilan menganyam, keterampilan menjahit, serta pembuat kue. Hal dilakukan dengan maksud agar pada saat penyaluran bantuan program pemberdayaan tidak mengalami kendala atau dalam bahasa lain tidak tetap sasaran.

Aspek lain yang dilakukan kepala desa Suka Makmur dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program kebutuhan yang disusun sendiri oleh masyarakat melalui kegiatan musyawarah dusun sampai musyawarah tingkat desa (Musrenbangdes) hal ini dilakukan karena merekalah yang tahu akan kebutuhannya, melibatkan orang miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya. Disamping itu pula kepala desa melibatkan berbagai pihak (Instansi pemerintah, lembaga pendidikan, PT, LSM, Karang Taruna, swasta) dilakukan secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah desa Suka Makmur sangat penting terutama dalam hal sokongan dana sepenuhnya dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting.

Berbagai program yang dikurcurkan oleh pemerintah desa Suka Makmur dalam hal kepala desa menjadi sebuah dorongan bagi masyarakat dengan harapan

agar mereka lebih percaya diri dalam mengelola serta mengembangkan usaha bantuan yang ada. Kepercayaan diri yang dimiliki masyarakat terutama para penerima manfaat dari bantuan tersebut menambah peran pemerintah desa sebagai penguatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam rangka peningkatan jumlah warga sasaran pemberdayaan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian masyarakat telah menunjukkan sebuah garansi kepada pemerintah desa melalui peran kepala desa Suka Makmur dalam membangun menumbuhkan rasa percaya diri mereka ketika mengelola program pemberdayaan tersebut.

Peningkatan kapasitas warga dalam segala bidang misalnya dalam bidang , pertanian, peternakan, pertanian, usaha mikro yang lebih mengarah pada perubahan perilaku yang seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat yang disentuh dengan bantuan program tidak menjaga dengan baik, bahkan tidak tertarik untuk memajukan serta mengembangkan usaha mereka, karena ada asumsi bahwa toh setiap tahunnya pemerintah daerah selalu membagikan bantuan baik ekonom dalam jangka panjang secara bertahap mampu mengadakan menciptakan usaha-usaha baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tersebut.

Sejalan dengan pemahaman pemberdayaan sebagai proses perubahan sehingga kepala desa Suka Makmur berperan juga dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan yang ada di desa Suka Makmur. Dengan berjalannya waktu, berbagai program yang telah dilakukan ungkapan masyarakat pada setiap tahun telah disediakan anggaran yang bersifat

pemberdayaan dalam rangka pengembangan yang dinilai oleh masyarakatnya. Keberhasilan program ini tak lepas pula berkat partisipasi masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan selama ini. Sehingga visi dan misi serta tujuan pemerintah desa suka makmur dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dapat terwujud walaupun tidak setiap tahun perubahan tidang signifikan.

Dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur tidak luput dari kendala-kendala yang menghambat kegiatannya, antara lain masih disebabkan adanya pola pikir masyarakat bahwa bantuan ini semata-mata ditujukan kepada mereka (masyarakat sasaran) yang setiap tahun datang dari pemerintah. Sehingga membentuk jiwa mereka yang kurang bertanggungjawab dalam pengembangan usaha, mempertahankan bahkan meningkatkan usaha yang sudah ada. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan pemerintah desa kepada masyarakat sasaran melalui pemahaman, penguatan serta dorongan sehingga mereka mampu mengembangkan usaha yang sudah ditelorkan pemerintah yang akan bermuara pada kemandirian. Jika hal itu dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepla desa sudah pasti masyarakat akan memberikan apresiasi atas usaha pemerintah dalam pemberdayaan tersebut. Dengan demikian, akan terbangun rasa percaya diri pada masyarakat yang akan mampu menghilangkan perasaan ketergantungan pada orang lain.

Selanjutnya dapat dijelaskan bagaimana peranan pemerintahan desa suka makmur dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengakuan diri. pemberdayaan melalui pengakuan ini perlu dilakukan agar keberhasilan program pemberdayaan

untuk masyarakat di desa suka makmur akan berhasil dengan baik. Ini dapat diwujudkan melalui perannya kepala desa bersama seluruh aparat dalam melakukan pembangunan secara berkeanjutan melalui pemberdayaan. Dapat pula dimaknai dengan memberikan perlakuan kepada masyarakat agar terjadi perubahan paradigma dan keadaan sekarang menjadi keadaan yang diharapkan. Misalnya saja merubah paradigma bantuan yang diberikan sebagai stimulan tetapi bukan memanjakan keadaan yang biasanya, sehingga pemberdayaan menjadikan mereka agar lebih banyak berfikir kearah perubahan yang lebih baik.

Bentuk lain terhadap pengakuan atas keterlibatan langsung masyarakat dalam pemberdayaan telah memberikan hasil yang baik serta telah memberi dampak positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui penumbuhan rasa kemandirian masyarakat secara terus menerus. Peran serta kepala desa menunjukkan adanya keberpihakan kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara perlahan-lahan terjadi. Ini menunjukkan bahwa pengakuan yang diarahkan kepada masyarakat akan selalu mendorong mereka agar senantiasa melakukan hal-hal yang bersifat membangun kemandirian dari masyarakat yang ada.

Dalam rangka itulah pemerintah desa suka makmur selalu mendorong masyarakat agar ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam usaha pemberdayaan merupakan suatu bentuk pengakuan yang menjadi komitmen bersama elemen pembangunan di desa. Tindakan positif yang ditunjukkan pemerintah desa sebagai aktor dalam penggerak peran serta

masyarakat menjadi sebuah harapan masyarakat secara keseluruhan dalam keberhasilan di desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato.

Keikutsertaan masyarakat secara penuh dalam kegiatan pembangunan di desa suka makmur membuktikan bahwa pemerintah telah memberi ruang yang luas kepada masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan partisipasinya secara mandiri tanpa berfikir secara individu. Sentuhan program pemberdayaan yang dilakukan secara selektif kepada masyarakat sasaran secara terapan dengan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan yang telah di capai oleh para penerima yang sifatnya stimulan telah menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga hal ini perlu di support secara baik oleh kepala desa bersama seluruh aparatnya.

Pengakuan yang telah dilakukan oleh kepala desa dianggap oleh masyarakat hal yang mendorong mereka untuk lebih tertib dalam memanfaatkan, memelihara serta melestarikan usaha yang sudah dilakukan bersama dengan pemerintah desa suka makmur. Pemerintah desa sebagai agen pemberdayaan dan pembangunan yang harus banyak memberi perhatian dalam rangka merubah perilaku masyarakatnya dengan berbagai bentuk pendampingan secara kontinyu. Agen pemberdayaan perlu memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan dimaksud. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha kecil memiliki kemampuan serta daya saing sehingga pendapatannya bisa meningkat dan kesejahteraan secara bertahap dapat meningkat pula.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa :

Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur telah menunjukkan keberhasilan yang walaupun belum secara signifikan, namun kegiatannya telah dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran program pemberdayaan yang berdomisili di desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato. Hal ini dapat dijelaskan bahwa program pemberdayaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa melalui peran kepala dalam menggerakkan potensi sumber daya yang ada dapat mengdari berbagai program yang menyentuh masyarakat antara lain pemberian bibit jagung kepada petani, usaha kecil produktif, pemberdayaan kelompok usaha pengrajin yang ada di desa suka makmur. Kemandirian yang dimiliki masyarakat ini tidak lain karena terjalannya usaha kerjasama yang baik antara kepala desa sebagai agen pemberdayaan dan pembangunan yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan program Pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur juga karena ikut serta peran kepala desa dalam menumbuhkan rasa percaya diri yang ditumbuhkan kepada masyarakat melalui komunikasi dan kerjasama yang sehingga masyarakat sangat menyadari dalam pemanfaatan potensi atau sumberdaya penduduk tumbuh menjadi sebuah dorongan dalam melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Hal lain juga ditemukan bahwa masyarakat

sasaran pemberdayaan memiliki keasadaran yang tinggi terhadap peran sertanya dalam mensukseskan program pemberdayaan di desanya sehingga menjadi harapan tertanam rasa percaya dalam mengembangkan semua poyensi yang ada pada diri mereka sebagai penerima masfaat program pemberdayaan serta pembangunan di desa tersebut.

Agar kesinambungan program pemberdayaan bagi masyarakat akan terwujud, juga diperlukan peran dari kepala desa sebagai agen pemberdayaan di desa suka makmur agar senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat secara intens sehingga rasa memiliki dan pengakuan yang ditunjukkan kepala desas kepada masyarakat dalam sentuhan berbagai program pemberdayaan masyarakat senantiasa terpatih dalam hati dan pikiran mereka. Kepala desa senantiasa mendorong beersama seluruh aparatnya memberi perhatian yang lebih terhadap pemberdayaan masyarakatnya sehingga keberhasilan program peemberdayaan itu sendiri telah menunjukkan hasil yang baik. Peran masyasrakat secara bersama-sama dengan pemerintah desa menjadi sebuah kekuatan yang terhimpun dengan baik sehingga keberhasilnnya dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat sasaran pemberdayaan tersebut.

5.2 Saran

Dalam penelitian tentang peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa suka makmur, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Kepala desa dalam menjalankan tugas fungsinya bersama-sama aparatnya dapat mempertahankan kondisi yang terjalin dengan masyarakat, hal ini dapat

menunjang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang sudah menjadi rencana dan sasaran tugas pemerintah desa suka makmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato lebih optimal.

2. Bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat agar menjalin hubungan baik serta mewujudkan bentuk tanggungjawab terhadap program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah, terutama pemerintah desa suka makmur melalui usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat, perlu pemberian pemahaman kepada masyarakat sangat mendukung keberhasilan pemberdayaan sehingga masyarakat lebih mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan (Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah)*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Tri Winanri, 1998, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan, etd repositorinugm ac.id/downloadfile, bibliografhy pdf.*
- Adi Isbandi Rukmianto. (2002). *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhi. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siswanti. 2003. *Perilaku Organisasi*. Cetakan Pertama, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Sugondo. 2001. *Otonomi Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjono, Dardjo, Junuzal Junus. (1990/1991). *Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa & Kelurahan*. Jakarta: PT. Union Cipta Muda.
- Ginanjjar Kartasasmita. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Paul, Samuel, 1987. *Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience*. Washington DC: The World Bank.
- Korten, David C. 1992. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta Lembaga Studi Pembangunan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kartasasmita, G. (1995). *pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat*. Bestari, 28–34.
- Widjaja HAW. 2003. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, ALFABET, Bandung

- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Afabeta, cv.
- Widjaja HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom , Bulat dan Utuh*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafiie Kencana Inu. 2001. *Manajemen Pemerintahan*. Penerbit Pustaka Reka Cipta
- Prastowo Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Ar-Ruzz Media.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Widjaja, HAW., Prof. Drs. (2003). *Pemerintahan Desa/ Marg.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.